

## **Pendidikan Damai sebagai Pendidikan Resolusi Konflik dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Toleransi dan Membangun Budaya Damai**

Rianda Usmi

Universitas Negeri Surabaya, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur  
riandausmi@unesa.ac.id

### **Abstract**

This research aims to describe (1) the conceptualization of peace education as conflict resolution education and the mission of citizenship education and (2) the realization of peace education to strengthen tolerance and build a culture of peace. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. The research results show that (1) the conceptualization of peace education as resolution education and the mission of citizenship education is an educational process based on a philosophy that teaches non-violence, love, compassion, trust, justice, and cooperation of all mankind. Peace education is education with several values, beliefs, traditions, behaviors, and lifestyles based on the principles of non-violence, tolerance, solidarity, respect for human rights and freedom; (2) the realization of peace education to strengthen tolerance and build a culture of peace can be realized in three domains, namely; first, macro (government policy); second, meso (school institutions, family/community); third, micro (curriculum). Peace education can be internalized and taught to society through these three domains.

**Keywords:** Peace Education, Conflict Resolution, Citizenship Education, Tolerance, Culture of Peace

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) konseptualisasi pendidikan damai sebagai pendidikan resolusi konflik dan misi pendidikan kewarganegaraan (2) perwujudan pendidikan damai untuk penguatan toleransi dan membangun budaya damai. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) konseptualisasi pendidikan damai sebagai pendidikan resolusi dan misi pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah proses pendidikan yang didasari oleh filosofi yang mengajarkan nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan (trust), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia. Pendidikan damai adalah pendidikan dengan sejumlah nilai, keyakinan, tradisi, perilaku, dan gaya hidup yang berbasis pada prinsip-prinsip non kekerasan, toleransi, solidaritas, menghargai hak asasi manusia dan kebebasan; (2) perwujudan pendidikan damai untuk penguatan toleransi dan membangun budaya damai dapat dijawabantahkan dalam tiga domain, yaitu; pertama, makro (kebijakan pemerintah); kedua, meso (institusi sekolah, keluarga/masyarakat); ketiga, mikro (kurikulum). Melalui ketiga domain ini pendidikan damai dapat diinternalisasikan dan diajarkan kepada masyarakat

**Kata Kunci:** Pendidikan Damai, Resolusi Konflik, Pendidikan Kewarganegaraan, Toleransi, Budaya Damai

Copyright (c) 2024 Rianda Usmi

✉ Corresponding author: Rianda Usmi

Email Address: [riandausmi@unesa.ac.id](mailto:riandausmi@unesa.ac.id) (Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur)

Received 26 February 2024, Accepted 4 March 2024, Published 11 March 2024

## **PENDAHULUAN**

Sebuah keniscayaan dan merupakan realitas sosial, Indonesia adalah salah satu negara yang beragam baik dari segi suku, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terjadi di seluruh penjuru tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 mencatat dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia terdiri atas 1.128 suku, 743 bahasa, dan 6 agama dengan komposisi 87.18% beragama Islam, 6.96% Protestan, 2.91% Katolik, 1.69% Hindu, 0.72% Budha, dan 0.05% beragama konghucu, begitupun dengan kebudayaannya yang beranekaragam.

Pluralitas agama, suku, bahasa, dan budaya di Indonesia rawan dengan potensi konflik, terutama perihal intoleransi dan kekerasan. Meskipun konflik merupakan sesuatu yang alami yang pasti ada dalam kehidupan. Dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, kerap kali terjadi konflik antara masyarakat baik itu konflik etnik/konflik multikultur maupun konflik atas nama agama. Antara tahun 1952 hingga tahun 2000, misalnya, konflik di Kalimantan Barat antar berbagai etnis paling tidak telah terjadi 12 kali. Konflik-konflik tersebut antara lain: pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak di tahun 1952, peristiwa pengusiran orang-orang yang berlatarbelakang Etnis Cina oleh orang Dayak di tahun 1967, peristiwa kerusuhan antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak tahun 1979 yang terjadi di Kalimantan, peristiwa pertikaian antara Etnis Madura dan Etnis Dayak yang terjadi di tahun 1983, peristiwa kerusuhan Etnis Dayak dengan Etnis Madura yang terjadi di Sanggau Ledo di tahun 1997, konflik antara Etnis Madura dengan Etnis Dayak yang terjadi di Kalimantan pada tahun 1998, konflik antara Etnis Melayu dengan Etnis Madura yang terjadi di Sambas, dan kerusuhan Etnis Melayu Pontianak dengan Etnis Madura yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2000 (Suharno, 2015).

Kemudian pasca Orde Baru, data yang dihimpun dari FICA (*Fellowship of Indonesian Christians in America*), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), PIK (Pusat Informasi Kompas), dan PDAT (Pusat Data dan Analisa Tempo), menunjukkan perusakan dan penutupan gereja secara paksa, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat terus meningkat dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi dalam sepuluh tahun masa peralihan dari Orde Soeharto ke Orde Reformasi (1995 – 2004) yang mencapai 180 kasus. Ini berarti, dalam satu bulan terjadi lebih dari satu kali kasus penutupan/perusakan gereja (laporan tahunan Moderate Muslim Society, 2010).

Sementara itu, data konflik antar agama yang dihimpun *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery* (UNSFIR, 2003). Sejak 1998 sampai dengan 2003, telah terjadi 428 kasus konflik dan kekerasan bernuansa agama. Frekuensi konflik paling banyak terjadi pada tiga tahun pertama reformasi, yakni 1988 – 2000 sebanyak 297 kasus. Puncaknya terjadi pada tahun 2000 yang mencapai 166 kasus intoleransi.

Selanjutnya, Laporan Tahunan 2008 Setara Institute justru mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam 265 peristiwa. Tiga provinsi menunjukkan angka pelanggaran yang sangat tinggi, yakni Jawa Barat (73 kasus), Sumatera Barat (56 kasus) dan Jakarta (45 kasus). Tiga provinsi ini memiliki tingkat multikulturalisme yang rendah sekaligus menyimpan potensi konflik agama cukup tinggi (laporan kebebasan beragama Setara Institute, 2008).

Kemudian di tahun 2015 kita kembali dikejutkan dengan Kasus Tolikara dan Aceh Singkil. Mengutip pendapat dari Azyumardi Azra (*Republika*, 30 Juli 2015) yang mengatakan Peristiwa Tolikara Papua 17 Juli 2015, ketika jamaah shalat Idul Fitri dibubarkan massa Gereja Injili Indonesia (GIDI), jelas merupakan salah satu bentuk intoleransi keagamaan. Sementara peristiwa kerusuhan di Aceh Singkil pada tanggal 13 Oktober 2015 juga diakui oleh Ketua Umum PGI, Henriette Hutabarat Lebang sebagai tindakan intoleransi (*Republika*, 14/10). Pun masih banyak konflik-konflik agama

maupun konflik etnik lainnya yang terjadi di Indonesia. Masih berkaitan dengan toleransi, Berdasarkan survei oleh lembaga studi Center of Strategic and International Studies (CSIS), toleransi beragama orang Indonesia masih rendah. Hal tersebut dibuktikan Pada survei CSIS, sebanyak 59.5 % responden tidak berkeberatan bertetangga dengan orang beragama lain. Namun sekitar 33.7% lainnya menjawab sebaliknya. Penelitian juga dilakukan pada bulan Februari 2015 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden. Saat ditanya soal pembangunan rumah ibadah agama lain di lingkungannya, sebanyak 68.2 % responden menyatakan lebih baik hal itu tidak dilakukan. Dan hanya 22.1 % yang tidak keberatan apabila ada pembangunan rumah ibadah agama lain.

Melihat berbagai fenomena di atas tentu muncul dibenak kita, konflik-konflik tersebut merupakan konflik yang terjadi pada tempo dulu dan sudah menemui penyelesaian. Akan tetapi hal tersebut menjadi potret kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang tidak pernah lepas dari potensi konflik yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maraknya konflik horizontal ditengah masyarakat menunjukkan pemerintah belum mampu membangun budaya damai secara komprehensif di kehidupan masyarakat. Dalam konteks demikianlah, perlu upaya terus menerus untuk mendorong penguatan toleransi demi terwujudnya budaya damai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara pluralis harus mampu memanajemen konflik, agar konflik tersebut dapat diminimalisir dan diantisipasi. Salah satu strategi yang bisa dilakukan Indonesia dalam manajemen konflik multikultur ialah melalui pendidikan. Lewat pendidikan, peserta didik diajarkan untuk berperilaku toleran, mencintai sesama, dan berupaya mewujudkan budaya damai. Pendidikan seperti ini sering kali kita dengar dengan istilah Pendidikan Damai (*Peace Education*) atau di beberapa tempat juga dinamakan pendidikan resolusi konflik yang merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan damai (*Peace Education*) atau pendidikan resolusi konflik sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *Culture of Peace* di atas prinsip kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Langkah ini diharapkan akan menjadi metode yang secara sistemik dan strategis untuk mencegah perilaku intoleransi dan kekerasan dalam masyarakat, karena perilaku intoleran tidak saja mengganggu integrasi dan harmoni sosial namun lebih dari itu dapat membahayakan keutuhan NKR. Artikel ini akan mengulas mengenai pendidikan damai sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan dan resolusi konflik dalam kaitannya dengan penguatan toleransi untuk membangun budaya damai di Indonesia. Beberapa pertanyaan kunci yang akan diangkat: Bagaimana konseptualisasi pendidikan damai sebagai resolusi konflik dan misi Pendidikan Kewarganegaraan? dan bagaimana peran pendidikan damai untuk penguatan toleransi dan membangun budaya damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur.

Sumber data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan baik pendidikan damai maupun Pendidikan Kewarganegaraan. Prosedur meta analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, dan mereview sumber data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan peninjauan, setelah itu dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif.

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Pendidikan Damai sebagai Pendidikan Resolusi Konflik dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan***

Konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan terhindarkan dalam kehidupan (Rojuli, 2019, Barango et. al, 2015). Jones (2015) juga mengungkapkan bahwa konflik merupakan suatu realitas sosial yang akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Konflik dalam kehidupan sosial artinya terjadinya benturan kepentingan, pendapat, keinginan yang melibatkan dua pihak atau lebih (Lauer, 1993; Chandra, 1992). Demikian juga menurut Robinson & Davidson (2006) bahwa konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan, pertengkaran, adu argumentasi, bentrokan kepentingan dan tujuan, ide, dan lain sebagainya. Konflik menandakan dinamisasi sejarah kehidupan manusia dan menjadi entitas hubungan sosial. Senada dengan pandangan tersebut, kehidupan sehari-hari menurut Volmer dan Binnewies et al. (2012) konflik dimaknai sebagai perselisihan antara dua orang atau lebih yang mengganggu hubungan sosial. Dengan demikian, konflik muncul ketika dua pihak atau lebih merasa bahwa kepentingan mereka tidak sesuai (Barango et. al, 2015).

Ketika konflik muncul, individu memiliki dua pilihan yaitu meneruskan konflik atau menyelesaikan konflik (Rojuli, 2019). Upaya penyelesaian konflik dapat dimaknai sebagai resolusi konflik. Menurut Mindes (2006) resolusi konflik adalah kemampuan dalam menyelesaikan perbedaan yang menjadi aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk berkompromi, bernegosiasi, serta mengembangkan rasa keadilan. Salah satu pendekatan untuk menangani konflik atau meresolusi konflik adalah pendidikan perdamaian (Rojuli, 2019). Begitupun menurut Malihah, Nurbayani dan Supriyono (2015) bahwa terdapat berbagai program resolusi konflik yang tersedia yang dikembangkan dengan berbagai nama seperti pendidikan resolusi konflik, pendidikan perdamaian, penciptaan perdamaian, pencegahan kekerasan, dan pengurangan kekerasan. Dengan demikian pendidikan damai maupun pendidikan resolusi konflik merupakan salah satu dari program resolusi konflik. Maka dalam konteks pendidikan di persekolahan, menurut Crawford dan Bodine (1996) terdapat beberapa program resolusi konflik yang dapat dikembangkan antara lain latihan resolusi konflik, kelas dan sekolah yang damai, program mediasi teman sebaya, dan pusat mediasi komunitas. Semua program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami pentingnya menyadari bahwa konflik adalah realitas kehidupan yang alami yang dapat diselesaikan secara damai, mengembangkan kesadaran akan tanggapan seseorang terhadap konflik dan tanggapan orang lain terhadap konflik, mempelajari dan mempraktikkan prinsip-prinsip resolusi konflik dan keterampilan untuk mencapai penyelesaian akhir yang

damai, memberdayakan secara individu atas cara penyelesaian konflik secara damai dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Malihah, Nurbayani dan Supriyono, 2015).

Kemudian tinjauan pendidikan damai sebagai misi Pendidikan Kewarganegaraan bertitik tolak dari hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Susan Hunter dan Rivhard A. Brisbin (Cholisin, 2011) mengartikan PKn atau yang umum juga disebut *civic education* adalah pembelajaran yang menggugah rasa ingin tahu dan kepercayaan (*trust*) terhadap norma-norma sosial yang mengatur hubungan personal dalam masyarakat sebagaimana mengatur partisipasi politik. Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan pada standar isi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyebutkan “mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945”.

Kemudian, pada perkembangannya Pendidikan Kewarganegaraab merupakan pendidikan mengenai persoalan kewarganegaraan antara warga negara dengan negara, baik itu individu dan individu, individu dan kelompok, individu dan lingkungannya, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan bela negara, pendidikan hukum, pendidikan politik, pendidikan nilai, pendidikan karakter, pendidikan multikultural, pendidikan resolusi konflik atau pendidikan damai, pendidikan lingkungan, pendidikan kesehatan, pendidikan kesejahteraan, pendidikan HAM, pendidikan gender, pendidikan demokrasi, pendidikan anti korupsi dan nepotisme (Irianto, 2015). Dengan demikian, Pendidikan damai adalah salah satu bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan damai secara sederhana dapat dipahami dari pendapat Tricia S. Jones, sebagaimana dikutip Ahmad Baedowi (Sukendar, 2011) yang mendefinisikan pendidikan damai atau pendidikan resolusi konflik sebagai “*a spectrum of processes that utilize communication skills and creative and analytic thinking to prevent, manage, and peacefully resolve conflict*”. Zamroni (2008) memberikan defenisi pendidikan damai sebagai suatu bentuk pemberdayaan manusia dengan keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan yang meliputi hal-hal sebagai berikut; pertama, membangun, menegakkan dan memperbaiki hubungan di semua level interaksi manusia; kedua, mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bersifat positif untuk menyelesaikan konflik, dimulai dari personal sampai internasional; ketiga, menciptakan lingkungan yang aman, baik secara fisik maupun emosional, yang dibutuhkan semua individu; dan keempat, membangun lingkungan yang aman secara berkelanjutan dan melindunginya dari adanya eksploitasi dan perang. Adapun menurut *International Peace Research Association* (IPRA) dalam Konferensi yang ke-17 di Durban, Afrika Selatan, pada tanggal 23 Juni 1998 (Sukendar, 2011) dinyatakan bahwa pendidikan damai adalah proses memberdayakan orang dengan kecakapan, sikap dan pengetahuan (*skills, attitudes, and knowledge*) untuk; pertama, membangun, memelihara dan memperbaiki hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia (*to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction*); kedua,

mengembangkan pendekatan-pendekatan positif terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat internasional; ketiga, menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu; keempat, menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; kelima, membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan.

Dengan demikian konseptualisasi pendidikan damai merupakan sebuah proses pendidikan yang didasari oleh filosofi yang mengajarkan nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan (*trust*), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia. Pendidikan damai adalah pendidikan dengan sejumlah nilai, keyakinan, tradisi, perilaku, dan gaya hidup yang berbasis pada prinsip-prinsip non kekerasan, toleransi, solidaritas, menghargai hak asasi manusia dan kebebasan.

Merujuk defenisi yang diberikan oleh IPRA tujuan dari pendidikan damai ialah untuk membangun, memelihara dan memperbaiki hubungan di semua level dalam seluruh interaksi manusia (*to build, maintain, and restore relationships at all levels of human interaction*); mengembangkan pendekatan-pendekatan positif terhadap cara untuk menangani konflik, dari level personal sampai tingkat internasional; menciptakan lingkungan yang aman, baik lingkungan fisik maupun emosi yang mengayomi semua individu; menciptakan sebuah dunia yang aman berdasarkan keadilan dan hak asasi manusia; membangun sebuah lingkungan yang lestari dan menjaganya dari eksploitasi dan peperangan. Apabila dicermati defenisi dan tujuan dari pendidikan damai terdapat kesamaan dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mengembangkan warga negara yang lebih baik (*good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang berpartisipasi, demokratis, peduli, menghargai hak-hak orang lain, menjunjung HAM, toleransi, memiliki keadaban kewarganegaraan dan kecerdasan kewarganegaraan. Jadi pendidikan damai merupakan salah satu misi yang diemban oleh Pendidikan Kewarganegaraan.

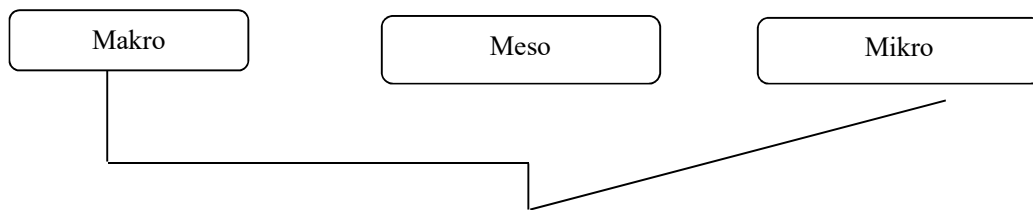
#### ***Perwujudan Pendidikan Damai untuk Penguatan Toleransi dan Membangun Budaya Damai***

Thomas Scanlon (Samsuri, dkk, 2013) menyatakan toleransi berkenaan dengan kesadaran moral yang dapat dimengerti dengan mengajukan pertanyaan *what we owe to each other?* Secara konseptual, toleransi dalam pandangan Scanlon meniscayakan kita untuk menerima dan merelakan orang lain untuk melaksanakan hal-hal yang bahkan kita tidak sepakat mengenai itu. Dengan demikian, toleransi itu melibatkan sebuah tingkah laku yang mengintermediasi dua situasi sekaligus: yaitu antara penerimaan sepenuh hati dengan ketidaksepakatan yang tak tertahankan. Dalam *Declaration of Principles in Tolerance* dikemukakan bahwa toleransi adalah penghormatan, penerimaan dan apresiasi terhadap perbedaan yang ada di dunia. Toleransi adalah harmonis dalam perbedaan yang bukan saja suatu kewajiban moral akan tetapi suatu hal yang dipersyaratkan dalam bidang politik dan hukum. Toleransi harus dilaksanakan oleh individu, kelompok dan masyarakat. Dalam konteks Ke-Indonesiaan yang merupakan sebuah bangsa dengan keberagaman baik agama, suku, ras, dan budaya, keberagaman bangsa Indonesia harus disikapi dengan toleransi antar masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya dengan berperilaku toleransi akan mampu menciptakan

budaya damai, di mana masyarakat akan hidup berdampingan tanpa adanya konflik dan kekerasan. Hal ini adalah tugas besar Pendidikan Kewarganegaraan yang mengemban misi pendidikan kedamaian. Apabila Pendidikan Kewarganegaraan mampu menanamkan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka NKRI akan tetap terjaga utuh, masyarakat akan hidup tentram, adil, dan damai. Akan tetapi sebaliknya, apabila Pendidikan Kewarganegaraan gagal dalam membangun dan membina perilaku toleransi, maka tidak menutup kemungkinan perpecahan yang akan terjadi dalam bangsa ini.

Bagaimana peran pendidikan damai untuk menguatkan toleransi dan membangun budaya damai? Praktik pendidikan damai dikelompokkan ke dalam empat kategori seperti pernyataan Gabriel Solomon (Sukendar, 2011) yaitu; pertama, pendidikan damai semata-mata sebagai aktivitas perubahan mindset; kedua, pendidikan damai semata-mata sebagai penanaman seperangkat kecakapan atau skill; ketiga, pendidikan damai sebagai promosi hak asasi manusia (khususnya di negara-negara dunia ketiga); dan keempat, pendidikan damai sebagai aktivitas pengelolaan lingkungan hidup, pelucutan senjata dan promosi budaya damai. Berkaitan dengan kategori yang ke empat sebagai promosi budaya damai, Menurut Elise Boulding (Suharno, 2015) pendidikan damai yang terus menerus akan menghasilkan budaya damai, karena pendidikan damai merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan nilai, perilaku dan cara hidup yang mendukung terciptanya budaya damai. Budaya damai adalah sebuah pendekatan integral mencegah kekerasan dan kekerasan konflik, dan alternatif budaya perang dan kekerasan berdasarkan pendidikan untuk perdamaian, promosi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, menghormati hak asasi manusia, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, partisipasi demokratis, toleransi, aliran bebas informasi dan pelucutan senjata (*UN resolution on the culture of peace*, 1998).

Suhadi (2015) juga mengilustrasikan melalui gambar bagan yang menjadi arena dari pendidikan damai dalam membangun budaya damai, yakni sebagai berikut.



Gambar 1. Arena Pendidikan Damai

Sebagaimana yang telah digambarkan pada bagan arena Pendidikan Damai di atas, di mana Pendidikan damai dapat berperan dalam domain makro (kebijakan pemerintah), meso (institusi sekolah/masyarakat), dan khususnya mikro (kurikulum) untuk membangun budaya damai. Pendidikan damai dapat diterapkan dalam tiga ranah tersebut. Pertama, pada ranah makro, yaitu melalui kebijakan pemerintah, pendidikan damai diinternalisasikan lewat kebijakan multikulturalisme atau melahirkan kebijakan-kebijakan publik, yang bersifat advokatif untuk meresolusi konflik dan menciptakan perdamaian. Dalam konteks penyelesaian konflik, formulasi kebijakan merupakan tahapan yang

krusial dalam upaya mewujudkan situasi damai yang sifatnya permanen (Suharno, 2015). Lanjutnya Suharno (2015) juga menyatakan, setiap unsur pengambil kebijakan di seluruh wilayah Indonesia perlu tertanam semangat untuk bisa melahirkan kebijakan di bidang apapun yang mampu melindungi dan mewadahi seluruh kepentingan masyarakat yang memang secara kodrati telah menjadi watak bangsa Indonesia yang multicultural, multi etnis, multi agama sehingga kebhinekaan tetap terpelihara dalam bingkai kesatuan Negara Indonesia. Dari pernyataan Suharno tersebut, arahnya adalah berupaya untuk melahirkan kebijakan yang akan menciptakan budaya damai.

Kedua, pada ranah meso, yaitu melalui sekolah, keluarga/masyarakat, mengutip dari pendapat Elise Boulding (Suharno, 2015) yang mengatakan budaya damai pertama-tama dapat ditemukan di dalam lingkup rumah tangga. Elise Boulding mengatakan bahwa orang tua, khususnya para ibu memiliki peranan strategis dalam rangka mendidik dan menumbuhkan budaya damai dalam keluarga. Upaya mendidik tersebut melalui pendidikan, yakni pendidikan damai dalam keluarga. Jadi, sudah memang seharusnya pendidikan damai sejak dini diperkenalkan kepada anak-anak, baik di lingkungan keluarga atau masyarakat maupun di lingkungan sekolah melalui pendidikan formal dengan seperangkat kurikulum. Menurut Ahmad Baedowi, untuk mengajarkan budaya damai di suatu lembaga pendidikan, seperti sekolah pihak manajemen sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan agenda keragaman budaya dan etnik ke dalam kurikulum sekolah (Sukendar, 2011). Hal tersebut dikarenakan menjadi kebutuhan instingtif siswa dalam memandang perbedaan, dan juga dengan adanya muatan budaya dan etnik dalam kurikulum formal juga akan meminimalisasi pemahaman siswa terhadap monopoli makna kebenaran secara sepihak.

Ketiga, pada ranah mikro, yaitu melalui kurikulum. Pendidikan damai menjadi bagian integral materi dalam kurikulum pendidikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Melissa Conley Teyler (Muslihah, 2014) yang tujuannya adalah untuk; (1) memajukan budaya damai dan menghilangkan budaya kekerasan; (2) memfokuskan pada tingkat antarpersonal, komunitas, dan internasional; (3) memajukan nilai-nilai dan keterampilan yang menjadi syarat untuk mengembangkan perdamaian; (4) menggunakan pendekatan andragogi secara konsisten.

Dalam kurikulum pendidikan, muatan budaya dan etnik sangat strategis dan penting untuk diinternalisasikan didalam kurikulum tersebut. Geneva Gay dalam *Culturally Responsive Teaching* (Sukendar, 2011) memberikan sedikitnya lima argumen mengapa muatan budaya dan etnik itu sangat strategis dan penting untuk ditubuhkan dalam kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan damai dan resolusi konflik, diantaranya sebagai berikut; Pertama, Muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan sangat krusial sekaligus esensial bagi perbaikan aspek pedagogis pengajar dalam mengajar. Kedua. Karena kebanyakan sumber belajar di ruang kelas adalah *textbook*, memasukkan agenda budaya dan etnik ke dalam *textbook* merupakan keniscayaan karena hal itu akan mengubah gaya mengajar guru. Ketiga. Berdasarkan riset secara simultan di beberapa lembaga pendidikan, muatan budaya dan etnik dalam kurikulum pendidikan memiliki arti yang banyak bagi para siswa sekaligus meningkatkan apresiasi siswa dalam belajar. Keempat. Relevansi muatan budaya dan etnik



dalam kurikulum juga menyumbang kelestarian sejarah, budaya, dan tradisi sebuah etnis tertentu sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan apresiasi kebangsaan yang tinggi dan memunculkan kohesivitas dan toleransi. Kelima. Biasanya muatan budaya dan etnik diambil dari berbagai sumber yang sangat kaya, bukan hanya dari buku tetapi juga dari pengalaman orang perseorangan, baik melalui wawancara maupun yang didokumentasikan dalam bentuk tayangan dan sebagainya. Artinya, sumber informasi yang sangat melimpah tentang budaya dan etnis di luar sekolah itu akan membantu baik guru maupun siswa dalam menciptakan kecintaan terhadap keragaman pola kehidupan.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks maraknya kekerasan dan perilaku intoleran, maka perlu untuk mendorong penguatan toleransi demi terwujudnya budaya damai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya itu ialah melalui pendidikan, yakni pendidikan damai. Pendidikan damai (*Peace Education*) sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan *culture of peace* di atas prinsip kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan damai diharapkan menjadi metode yang secara sistemik dan strategis untuk mencegah perilaku intoleransi dan kekerasan dalam masyarakat, karena perilaku intoleran tidak saja mengganggu integrasi dan harmoni sosial namun lebih dari itu dapat membahayakan keutuhan NKRI.

Konseptualisasi pendidikan damai adalah sebuah proses pendidikan yang didasari oleh filosofi yang mengajarkan nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan (*trust*), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia. Pendidikan damai yang terus menerus akan menghasilkan budaya damai, karena pendidikan damai merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan nilai, perilaku dan cara hidup yang mendukung terciptanya budaya damai.

Kemudian, dalam konteks Ke-Indonesiaan keberagaman bangsa Indonesia harus disikapi dengan toleransi antar masyarakat Indonesia, sehingga pada akhirnya dengan berperilaku toleransi akan mampu menciptakan budaya damai, di mana masyarakat akan hidup berdampingan tanpa adanya konflik dan kekerasan. Dengan toleransi hidup akan tentram, tertib, dan damai. Dalam membangun budaya damai di Indonesia, pendidikan damai dapat berperan dalam tiga domain, yaitu; pertama, makro (kebijakan pemerintah); kedua, meso (institusi sekolah, keluarga/masyarakat); ketiga, mikro (kurikulum). Melalui ketiga ranah tersebut pendidikan damai dapat diinternalisasikan dan diajarkan kepada masyarakat.

## **REFERENSI**

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Sensus Penduduk 2020*. Jakarta.
- Barango-Tariah., Hope Okonne, & Ifeoma Beatrice. 2015. Concepts Education, Conflict Resolution and Peace. *Journal of Education and Policy Review*, 7(1), 70-77.
- Chandra. 1992. *Konflik dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Kanisius.

- Cholisin. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Crawford, D., & Bodine, R. 1996. *Conflict Resolution Education: A Guide to Implementing Programs in Schools, Youth-Serving Organizations, and Community and Juvenile Justice Settings*. Program Report Washington, DC: US Dept of Justice Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Elly Malihah, Siti Nurbayani & Supriyono. 2015. Teaching Conflict Resolution through General Education at University: Preparing Students to Prevent or Resolve Conflicts in a Pluralistic Society. *Asian Social Science*, 11(12), 1-12. <http://dx.doi.org/10.5539/ass.v11n12p353>
- Irianto, Petrus. 2015. Analisis Yuridis Kurikulum Satuan Pendidikan dan Materi dalam Kompetensi Dasar Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada Permendikbud No. 54,64,66,67,68,69,70 Tahun 2103. Makalah disajikan dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-1, Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2015.
- Jones, Mrs. Deana C. 2015. Conflict Resolution for the Classroom, TEACH. *Journal of Christian Education*, 9(2), 4-9.
- Laporan Tahunan tentang Potret Toleransi dan Intoleransi di Indonesia. 2010. Jakarta: Moderate Muslim Society.
- Laporan Kebebasan Beragama. 2008. Jakarta: Setara Institute.
- Lauer. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mindes, Gayle. 2006. *Teaching Young Children Social Studies*. United States of Amerika: Praeger Publishers.
- Muslihah, Eneng. 2014. Pesantren dan Pengembangan Pendidikan Perdamaian. *Jurnal Studi Keislaman*, 14(2), 315-319.
- Republika. 2015. *Intoleransi Kegamaan*. Jakarta: 30 Juli 2015, hlm 6.
- Republika. 2015. *Peristiwa Kerusuhan Aceh Singkil*. Jakarta: 14 Oktober 2015, hlm 4.
- Robinson, M & Davidson, G. (Eds.) (2006). *Chambers 21 st Century Dictionary*, Revised Edition. Allied Chambers Limited, New Delhi.
- Rojuli, S. 2019. *Menangani masalah di sekolah dengan resolusi konflik*. Malang: Dream Litera Buana.
- Samsuri, dkk. 2013. *Model Peace-Building Teaching and Learning: Sebuah Intervensi Pencegahan Kekerasan Melalui Pendidikan Formal*. Yogyakarta: Fakuktas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siswoyo, D, dkk. 2013. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY PRESS.
- Suhadi. 2015. Pendidikan Multikultur Dari Aspek Keragaman Agama. Makalah disajikan dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-1, Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2015.
- Suharno. 2015. Urgensi Kebijakan Berwatak Multikultural di Indonesia. Makalah disajikan dalam Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke-1, Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2015.

Sukendar. 2011. Pendidikan Damai (*Peace Education*) Bagi Anak-Anak Korban Konflik. *Jurnal Walisongo*, 19(2), 274-279.

Survei Lembaga Studi Center of Strategic and International Studies (CSIS). 2015. *Toleransi Beragama Orang Indonesia Masih Rendah*. Jakarta.

Volmer, J., Binnewies, C., Sonnentag, S., & Niessen, C. 2012. Do Social Conflicts with Customers at Work Encroach Upon Our Private Lives? A Diary Study. *Journal of Occupational Health Psychology*, 17(3), 304-315. <http://dx.doi.org/10.1037/a0028454>

Zamroni. (2008). *Model-model Pembelajaran*. Dit. Pendidikan Lanjutan Pertama. Jakarta.